

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
BOTTO BENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO**
*ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT POLICIES IN BOTTO
BENTENG VILLAGE, MAJAULENG DISTRICT, WAJO REGENCY*

Eka Patmasari^{1*}, Ilham²

^{1*} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Puangrimanggalung,
Sengkang, Indonesia

² Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

^{1*}ekapatmasari7@gmail.com , ²ilhamparepos@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset ini menemukan bahwa secara keseluruhan pembangunan di Desa Botto Benteng telah mengikuti peraturan yang ada. Kendati demikian, dalam penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur desa masih perlu ditingkatkan. Adapun partisipasi masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Mengenai pengawasan dan pembangunan, Pemerintah Daerah telah melakukan pemantauan. Namun, pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, hanya mencakup partisipasi fisik tanpa keterlibatan yang luas mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Faktor Pendukung, meliputi; ketersediaan dana, partisipasi masyarakat, dan peraturan yang berlaku. Faktor penghambat yaitu kurangnya pengawasan yang optimal dari masyarakat, kondisi cuaca dan medan, serta fluktuasi harga bahan material. Sebagai rekomendasi, dapat lebih meningkatkan upaya pembangunan terutama dalam sektor infrastruktur jalan dan jembatan, yang menjadi prioritas utama bagi masyarakat di Desa Botto Benteng, meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat Bottobenteng, dan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana pemerintah Desa untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana yang terjadi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur

Abstract

This study aims to analyze infrastructure development policies in Botto Benteng Village, Majauleng District, Wajo Regency. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was done through observation, interviews, documentation, and literature study. Data analysis was carried out through several stages; data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research found that overall development in Bottobenteng Village has followed existing regulations. However, the implementation of village infrastructure development policies still needs to be improved. Community participation has also not been fully optimized. Regarding supervision and development, the local government has conducted monitoring. However, the supervision carried out by the community is still limited, only covering physical participation without extensive involvement from the planning stage to supervision. Supporting factors include: availability of funds, community participation, and applicable regulations. The inhibiting factors are the lack of optimal supervision from the community, weather and terrain conditions, and fluctuations in material prices. As a recommendation, it can further increase development efforts, especially in the road and bridge infrastructure sector, which is a top priority for the community in Bottobenteng Village, improve the efficiency of village development planning by involving the participation of the Botto Benteng community, and increase community supervision of the use of village government funds to ensure that no misuse of funds occurs.

Keywords: Policy, Development, Infrastructure

PENDAHULUAN

Pembangunan desa di negeri ini masih menjadi salah satu masalah besar yang belum terselesaikan. Keberadaan desa di wilayah pedalaman menghadapi tantangan yang jauh dalam pembangunan. Permasalahan yang di wilayah desa merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, dan sudah menjadi bagian yang mesti dihadapi oleh komunitas desa di Indonesia. Merujuk, berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa bervariasi yang tergantung pada faktor-faktor, seperti; letak geografis, kondisi social, ekonomi dan budaya (Azs, 2023).

Proses pembangunan merupakan upaya dalam rangka mencapai perubahan-perubahan positif yang telah direncanakan dengan baik. Proses ini kemudian melibatkan berbagai sistem sosial yang mencakup beberapa bidang-bidang, seperti; pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, keamanan, pendidikan, teknologi, institusi, dan budaya. Pada kajian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pembangunan pada bidang infrastruktur. Menurut Simbolon et al., (2021) dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bentuk dari kepedulian pemerintah, sebagai perwujudan dari model pembangunan tersebut, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP).

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen kunci dalam upaya pembangunan, termasuk dalam sektor pertanian dan pengembangan desa. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan laju perekonomian dalam suatu wilayah, termasuk di tingkat pedesaan (Irmansyah et al., 2021). Di banyak daerah di Indonesia, masih ada ribuan desa yang jauh tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan dengan kota yang memiliki sumber daya lebih lengkap. Salah satunya adalah Desa Botto Benteng. Penting untuk turut menjadi perhatian dalam rangka pembangunan desa adalah melalui pelibatan masyarakat sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat (Ariadi, 2019).

Selanjutnya, menghadirkan pembangunan menjadi pencapaian dan tujuan akhir dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama pada di tingkat pedesaan. Dimana, tidak sedikit infrastruktur desa yang memiliki kondisinya yang tidak terurus, bahkan masih banyak ditemui desa yang belum memiliki infrastruktur seperti minimnya proses pembangunan jalan (Sondakh, 2021). Olehnya itu, Analisis kebijakan pembangunan infrastruktur desa merupakan hal yang perlu dibahas. Merujuk Dunn (2003) analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan pengetahuan mengenai proses dalam pembuatan suatu kebijakan public.

Sedangkan, Quade (dalam Dunn, 2003) mengatakan bahwa analisis kebijakan (policy analysis) adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan yang akan menyajikan atau menghasilkan informasi yang dapat dijadikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam rangka mengambil suatu keputusan. Berbicara mengenai analisis kebijakan, maka analisis kebijakan public dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan tersebut, dan setelah adanya kebijakan public tertentu. Pada konteks ini, analisis kebijakan yang dilakukan sebelumnya adanya kebijakan tersebut berpijak pada persoalan-persoalan public semata sehingga hasilnya benar-benar merupakan rekomendasi dari kebijakan public yang baru (Suardana, 2013).

Adanya pembangunan infrastruktur desa yang terbengkalai dengan kata lain tidak terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat pada kondisi infrastruktur jalan yang sungguh memprihatinkan dimana hal ini mempengaruhi akses mata pencaharian masyarakat, seperti halnya di desa Botto Benteng yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga perlunya perhatian lebih agar akses antara kediaman dan lahan pertanian masyarakat mampu dijangkau dengan lancar. Melihat adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tidak terealisasi dengan baik, juga penulis melihat dari segi tahapan pedoman pembangunan Desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemantauan dan pengawasan masih kurang efektif.

Dengan adanya masalah seperti yang telah dirincikan maka penulis tertarik melakukan penelitian kemudian mengangkat masalah ini dengan judul: “Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”. Penelitian ini bertujuan; untuk mengetahui kebijakan pembangunan infrastruktur desa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur desa di Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu riset maka penting adanya metode yang digunakan (Patmasari, 2022). Tentunya metode ini harus sejalan dengan pokok-pokok permasalahan yang sedang dibahas (Ilham et al., 2020; Sapioper et al., 2022). Adapun metode yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (dalam Sapioper et al., 2021) mensintesis dari berbagai definisi penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data adalah para informan penelitian yang memahami informasi obyek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, juga dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Patmasari, 2022). Dimana studi pustaka ini, sumber datanya berasal dari bahan-bahan Pustaka seperti, media online, jurnal, prosiding, dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas (Tokang et al., 2023; Yunita, 2022; Tebay & Ilham, 2023). Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Bottobenteng hingga saat ini terus berupaya meningkatkan pembangunan, Beberapa pelaksanaan berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi peningkatan fasilitas pemerintah, peningkatan jalan usaha tani, pembuatan embung, serta distribusi jamban keluarga kepada masyarakat. Fokus pembangunan di Desa Botto Benteng pada tahun 2022 adalah pada infrastruktur, terutama dalam pembangunan perkerasan jalan untuk mendukung usaha tani dan pembangunan embung-embung. Ini karena sebagian besar masyarakat Bottobenteng, yaitu 95%, adalah petani. Berdasarkan hasil observasi penulis, dari total jalan usaha tani yang telah dibangun di Desa Botto Benteng pada tahun 2022 adalah sepanjang 1 kilometer. Sebagai tambahan, terdapat pembangunan 30 embung-embung.

Perencanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan perencanaan menjadi sangat penting, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam penyusunan rencana pembangunan, penting untuk mempertimbangkan aspek jangka panjang. Ini mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berjangka waktu 6 tahun. Hal ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan desa telah mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, dalam tahap operasional, rencana ini dijabarkan lebih detail dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun setiap tahunnya.

Dokumen RPJMDes yang berlaku selama masa jabatan kepala desa kemudian diuraikan menjadi RKP Desa setiap tahun. Ini menjadi panduan bagi pemerintah desa

Desa Bottobenteng dalam menjalankan program pembangunan. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kegiatan di Desa Botto Benteng merupakan contoh dari pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Pendekatan perencanaan ini dimulai dengan mengenali langsung kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut. Adapun perencanaan ini melibatkan partisipasi masyarakat dari tahap pengusulan gagasan awal hingga evaluasi program yang sudah dilaksanakan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa dalam musyawarah desa dan rencana pembangunan Desa di Bottobenteng, partisipasi masyarakat masih kurang. Sosialisasi pembangunan partisipatif juga minim, karena belum terlihat upaya yang memadai dari pihak yang bertanggung jawab. Ini karena tingginya tingkat apatis masyarakat terhadap rapat semacam itu. Hasil wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa disebabkan oleh anggapan bahwa perwakilan, seperti kepala dusun, sudah mencukupi untuk mewakili seluruh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Bottobenteng turut memberikan ide dan masukan pada saat musyawarah dusun mengenai kebutuhan prioritas dalam lingkungan mereka, partisipasi mereka dalam musyawarah desa masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa orang dari setiap dusun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan di Desa Botto Benteng terutama difokuskan pada infrastruktur jalan, khususnya jalan yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Kepentingan pembangunan infrastruktur bagi perkembangan desa sangatlah penting karena dapat meningkatkan aksesibilitas pembangunan di desa, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki manfaat tambahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan budaya lokal, yang akan meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur desa, termasuk perbaikan jalan untuk mendukung transportasi masyarakat.

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disetujui, langkah selanjutnya adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui dalam RKP Desa akan menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Desa. Untuk melaksanakan pembangunan, diperlukan dukungan keuangan yang memadai. Hal ini karena pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan sumber daya lain yang tidak selalu tersedia di desa, sehingga harus didanai dari anggaran pemerintah desa.

Pelaksanaan

Pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari seluruh warga melalui kerja sama gotong-royong. Proses ini terbagi menjadi dua tahap, yakni persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Setelah RKP Desa ditetapkan, Kepala Desa mengangkat Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Mereka kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja dan disahkan melalui keputusan Kepala Desa. Kepala Desa juga menyampaikan informasi mengenai dokumen RKP Desa, APB-Des, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

Selanjutnya, Sosialisasi kegiatan di Desa Botto Benteng belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang

pedoman pembangunan Desa pasal 59, Kepala Desa seharusnya menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Namun, pemerintah Desa Bottobenteng hanya menginformasikan satu kegiatan pembangunan kepada dusun terkait. Dari wawancara yang dilakukan, dilihat bahwa pemerintah Desa Bottobenteng masih belum optimal dalam menjalankan sosialisasi kegiatan. Padahal, metode sosialisasi dapat diperluas melalui berbagai cara, seperti musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, penggunaan sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa.

Adapun fokus pembangunan di tahun 2022, didominasi dari sektor pertanian yakni perintisan/perkerasan usaha tani di tiga titik yakni, Perintisan/Perkerasan Jalan Tani Jekkee, Perintisan/Perkerasan Jalan Ajujawae dan Perkerasan Jalan Tani Warue. Kemudian pembangunan embung-embung sebanyak 60 unit. Dan selebihnya pengadaan jamban keluarga sebanyak 30 unit. Dari lima jenis pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Botto Benteng, dampak positifnya tetap dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, analisis kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Bottobenteng masih belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tetap memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Desa Bottobenteng perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan kelancaran transportasi darat bagi masyarakat. Selain itu, juga ditemukan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana oleh Pemerintah Desa setempat. Jika situasi ini terus berlanjut, Pemerintah yang ada dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan yang tidak benar.

Pemantauan/Pengawasan

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bekerja sama untuk memberdayakan masyarakat desa. Upaya ini dilakukan dengan mengawasi dan memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara partisipatif oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa memiliki hak untuk memantau pelaksanaan pembangunan desa. Terlibat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kegiatan pengawasan pembangunan di Desa Bottobenteng terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa, memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Desa tahun 2014, disebutkan bahwa masyarakat desa bertanggung jawab dalam memantau proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka. Pemantauan dan pengawasan merupakan elemen penting dalam kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan di Desa. Kontrol sosial ini akan berfungsi secara optimal apabila masyarakat Desa turut berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pembangunan desa.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo

Infrastruktur di Desa Botto Benteng pengerjaannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat:

Faktor Pendukung

- a. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa tidak mampu membiayai seluruh perencanaan yang ada. Kehadiran dana dari pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Botto Benteng. Bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Desa Bottobenteng telah meningkatkan kualitas pembangunan.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena berpengaruh besar terhadap kelancaran program serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun belum maksimal, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Botto Benteng tetap menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan beberapa program tahunan yang telah direncanakan. Partisipasi tidak hanya mencakup keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga meliputi kontribusi dalam bentuk pemikiran atau ide.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah faktor pendukung lainnya. Meskipun belum maksimal, keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide dan masukan mengenai permasalahan yang mereka hadapi sangat membantu dalam penyusunan rencana kerja, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dirancang untuk membantu mengendalikan kelompok, lembaga, organisasi, dan masyarakat agar mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Desa Botto Benteng.

Faktor Penghambat

a. Belum Maksimalnya Pengawasan

Pengawasan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan belum maksimal. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan oleh pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang optimal menjadi hambatan dalam proses pembangunan.

b. Cuaca dan Medan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Botto Benteng. Iklim di desa ini serupa dengan iklim di daerah lain di Kabupaten Wajo pada umumnya, yang mencakup musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Masalah utamanya adalah ketidakpastian cuaca. Cuaca yang tidak dapat diprediksi secara akurat dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan program pembangunan seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, terutama dengan tambahan kendala dari kondisi medan yang sulit diakses, terutama pada musim hujan. Keadaan alam bisa jadi jadi penyebab tertundanya rencana pembangunan. Tapi, menurut pengalaman saya di Bottobenteng, meskipun ada keterlambatan, semua rencana pembangunan tetap berhasil dilaksanakan. Tetap saja, cuaca dan medan adalah hambatan yang perlu diperhitungkan.

c. Harga Bahan Material

Harga material menjadi tidak menentu dalam proyek infrastruktur karena berpotensi membuat biaya konstruksi tidak sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Menurut hasil wawancara peneliti, berikut adalah beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber; yakni harga bahan-bahan material sebagai faktor penghambat, karena jika dana tidak memungkinkan sudah pasti programnya tidak jalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan, pembangunan di Desa Botto Benteng telah mengikuti peraturan yang ada. Kendati demikian, dalam penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pelaksanaan pada tahun anggaran 2022, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Dalam tahap perencanaan, pemerintah Desa Botto Benteng memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian, termasuk pembuatan embung untuk irigasi sawah dan pembangunan jalan usaha tani untuk memfasilitasi transportasi darat bagi masyarakat yang bertani. Fokus ini sejalan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, meskipun partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, tingkat keikutsertaan mereka dalam kegiatan musyawarah, mulai dari tingkat dusun, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sudah berjalan dengan baik

Pada tahun anggaran 2022, hanya empat jenis program pembangunan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan dana yang ada, partisipasi masyarakat dalam tahap ini masih terbatas, hanya sebagian kecil yang menerima gaji untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan ikut berpartisipasi. Dalam hal pengawasan dan pembangunan, Pemerintah Daerah telah melakukan pemantauan terhadap pemerintah Desa Bottobenteng. Namun, pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, hanya mencakup partisipasi fisik tanpa keterlibatan yang luas mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Faktor Pendukung, yang mendukung, mencakup semua elemen yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Botto Benteng, meliputi ketersediaan dana, partisipasi masyarakat, dan peraturan yang berlaku. Faktor penghambat yaitu semua faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Botto Benteng termasuk kurangnya pengawasan yang optimal dari masyarakat, kondisi cuaca dan medan, serta fluktuasi harga bahan material.

Sebagai rekomendasi, dapat lebih meningkatkan upaya pembangunan terutama dalam sektor infrastruktur jalan dan jembatan, yang menjadi prioritas utama bagi masyarakat di Desa Botto Benteng, meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat Bottobenteng, dan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana pemerintah Desa untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Azs. (2023). Memahami Permasalahan Desa dalam Berbagai Bidang. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-permasalahan-desa-dalam-berbagai-bidang-21W3wrYISuk/full> (Diakses, 5 Agustus 2024).
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ilham, I., Korwa, F. Y., Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2020). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Pulau Asey Besar Danau Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(2), 142-155.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.
- Patmasari, E. (2022). Local Wisdom" Weapon" Against Climate Change. *Sustainability & Climate Change*, 15(5).
- Patmasari, E. (2022). Multiplier Effect of Dam Development in Indonesia (A Study on Dam Development during the Leadership of President Joko Widodo). *Research and Analysis Journal*, 5(9), 17-23.

- Sapioper, H. C., & Flassy, M. (2021). Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*, 17(1).
- Sapioper, H. C., Ilham, I., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono, S., & Muttaqin, M. Z. & Patmasari, E.(2022). *Emas Merah Paniai: Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal*. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 116-126.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(1).
- Suardana, I. W. (2013). Analisis kebijakan pengembangan pariwisata. In *Seminar Nasional: Unud*.
- Tebay, V., & Ilham, I. (2023). Literature study: the community perception of rowing venue development in women's forest ecosystem, Youtefa Bay, Jayapura City, Papua. *Depik*, 12(1), 76-86.
- Tokang, M., & Yumame, J. (2023). Seeing the Atakkae Traditional House: Education, Tourism, Economic and Government Policy Perspectives in Its Development. *Journal of Educational Analytics*, 2(2), 141-156.
- Yunita, D. I. (2022). *Efektivitas Kebijakan "Belajar Daring" Masa Pandemi Covid-19 Di Papua*. wawasan Ilmu.